



CASCADING

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN GRESIK

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan											
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Indeks Kinerja Layanan Perhubungan											
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Meningkatnya Konektivitas Layanan Angkutan Umum											
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Persentase Wilayah Terlayani Angkutan Umum											
PROGRAM (SIPD)	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	2.1. Meningkatnya Ketersediaan Trayek Angkutan Jalan		2.2. Meningkatnya Kualitas Sarana Angkutan Jalan	2.3. Meningkatnya Kualitas Prasarana Angkutan Jalan			2.4. Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas		2.5. Meningkatnya Rekayasa Lalu Lintas		2.6. Meningkatnya Kualitas Layanan Parkir	
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase Trayek Angkutan Jalan yang ditetapkan sesuai kebutuhan		Persentase Angkutan Jalan yang layak fungsi	Persentase Terminal Angkutan Tipe C yang memiliki standar kelayakan operasional			Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas		Persentase Ruas Jalan yang menerapkan Rekayasa Lalu Lintas		Persentase Titik Lokasi Parkir yang dikelola sesuai Standart Operasional	
KEGIATAN (SIPD)	2.1.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		2.6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	2.1.1. Tersedianya Kajian Kebutuhan Trayek Angkutan Jalan		2.2.1. Terlaksananya Pengecekan/ Inspeksi Angkutan Umum Jalan	2.3.1. Meningkatnya ketersediaan fasilitas Terminal Tipe C	2.3.2. Meningkatnya Ketertiban Operasional Terminal Tipe C	2.3.3. Meningkatnya Ketersediaan Halte Angkutan Umum	2.4.1. Terlaksananya Kegiatan Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya	2.4.2. Tersedianya Dokumen Kajian Rekayasa Lalu Lintas	2.5.1. Tersedianya Dokumen ANDALALIN		2.6.1. Terlaksananya Pengelolaan Parkir yang tertib	
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Jumlah Kajian Kebutuhan Trayek Angkutan Jalan yang disusun		Jumlah Kegiatan Rampcheck yang terlaksana	Persentase Fasilitas Utama Terminal Tipe C kondisi baik	Persentase kendaraan yang masuk/keluar sesuai trayek resmi	Persentase Halte yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah Kegiatan Operasi Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Kajian Rekayasa Lalu Lintas yang disusun	Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Rekomendasi ANDALALIN		Jumlah Titik Lokasi Parkir yang ditetapkan	
SUB KEGIATAN (SIPD)	2.1.1.1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1.2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.2.1.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.3.1.1. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.3.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.3.2.1. Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	2.3.3.1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.4.1.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.4.2.1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.5.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.5.1.2. Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	2.6.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksanya Penertiban Kendaraan keluar/masuk terminal	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD)	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	Jumlah Penertiban Kendaraan keluar/ masuk terminal dan Jumlah petugas keamanan Terminal	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas Layanan Lalu lintas																											
Presentase Ruas Jalan Perkotaan dengan Nilai VC Ratio >0,5																											
						3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																					
2.7. Meningkatnya Kendaraan Angkutan laik Jalan						2.8. Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan				3.1. Meningkatnya Kualitas Sarana Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten		3.2. Meningkatnya Kualitas Prasarana Dermaga dan Pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten															
Persentase Kendaraan Lulus Uji						Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Perlengkapan Jalan				Persentase Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten yang layak fungsi		Persentase Prasarana Dermaga dan Pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten yang memenuhi standar kelayakan Operasional															
2.7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						2.8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		2.9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		3.1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		3.3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											
2.7.1.1. Meningkatnya Digitalisasi dan sistem pelayanan yang lebih efektif		2.7.2.1. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor		2.7.3.1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM penguji		2.8.1. Meningkatnya ketersediaan dokumen dan pedoman SMKA		2.9.1.1. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas		2.10.1.1. Meningkatnya Ketersediaan Penerangan Jalan Umum		3.1.1. Tersedianya Kajian Kebutuhan Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten		3.1.2. Meningkatnya Pengawasan Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten		3.2.1. Tersedianya Fasilitas Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten		3.2.2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas dermaga dan pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten		3.3.1.1. Meningkatnya ketersediaan fasilitas dermaga dan pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten							
Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor		Persentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Standart		Persentase ASN yang miliki Kompetensi Uji Kendaraan Bermotor		jumlah kebijakan yang di evaluasi		Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dalam Kondisi Baik		Persentase Penerangan Jalan Umum Dalam Kondisi Baik		Jumlah Kajian Kebutuhan Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten		Persentase Pengawasan Keberangkatan Angkutan Penyeberangan yang diawasi		Persentase Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten yang memiliki standart Keselamatan penumpang		Persentase fasilitas dermaga dan pelabuhan yang tersedia sesuai standar		Persentase fasilitas dermaga dan pelabuhan yang tersedia sesuai standar							
2.7.1.1. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.7.2.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.7.2.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.8.1.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		2.9.1.1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		2.10.1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		2.10.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		3.1.1.1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.2.1.1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		3.2.1.2. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal		3.3.1.1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		3.3.1.2. Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		3.3.1.3. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Terkendalnya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalnya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau		Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN											
3.3. Meningkatkan Keselamatan di Perlintasan KA Sebidang											
Persentase Perlintasan KA Sebidang yang dilengkapi Fasilitas Keselamatan yang memenuhi standart Keselamatan											
4.1. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.2. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
4.1.1. Meningkatnya pengamanan perlintasan kereta api sebidang	4.2.1. Meningkatnya pengamanan perlintasan kereta api sebidang	1.1.1. Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						1.1.2. Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan	1.1.3. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian		
Persentase Fasilitas keselamatan perlintasan KA sebidang Dalam Kondisi Baik	Persentase Fasilitas keselamatan perlintasan KA sebidang Dalam Kondisi Baik	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu						Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu		
4.1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.2.1.1. Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota	1.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.1.3.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.1.3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1.1. Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Rerata Persentase Capaian Kinerja Program														
1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.1.4. Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.1.5. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai standart			1.1.6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang		1.1.7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi						Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai standart yang disediakan			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik			
1.1.4.1. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.1.4.6. Penyediaan Bahan/Material	1.1.4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1.5.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.5.3. Pengadaan Mebel	1.1.5.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan/Material	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mebel	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediaka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/